

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pasar Sawahlunto dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, dalam hal ini badan yang langsung terjun untuk mengelola pasar yaitu UPTD Pasar Kota Sawahlunto, yang bekerja dibawah naungan Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto, dan dikoordinasi oleh Kabid Perdagangan Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto.
2. Kapital sosial yang terbentuk dalam pengelolaan pasar Sawahlunto dari Pemerintah hingga pedagang sebelum rehabilitasi pasar memiliki jaringan yang saling berhubungan antar aktor yang terlibat seperti Pemerintah, Pengurus Pasar, hingga Pedagang atau pemegang izin menempati kedai (IMK). Jaringan tersebut terbangun karena adanya kepercayaan antar pihak yang berhubungan. Kepercayaan terbentuk karena adanya keuntungan yang diperoleh pihak-pihak dalam jaringan tersebut. Dan juga terdapat norma yang mengatur hubungan tersebut.
3. Pembagian toko yang dilakukan oleh Pengurus Pasar kepada pedagang setelah selesainya proyek rahabilitasi gedung pasar Sawahlunto mendapat protes dari pihak pedagang karena mereka merasa tidak diuntungkan dalam hubungannya



dengan Pengurus Pasar. Hal ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan pedagang serta Pemerintah terhadap kinerja Pengurus Pasar.

4. Setelah penempatan pasar yang diperbarui dengan hasil pembagain toko dari Pemerintah, masalah yang muncul adalah sekitar 34% toko yang ada belum dioperasikan oleh pemegang IMK hingga saat ini. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah dalam pembagian toko dirasa kurang adil dari sudut pandang pemegang IMK, hal ini terjadi karea pemegang IMK tidak memahami landasan aturan pembagian toko yang dilakukan oleh Pemerintah.
5. Kapital sosial yang terbentuk setelah penempatan pasar yang telah direhabilitasi hingga sekarang tidak seperti sebelumnya. Hal ini dikarenakan berkurangnya kepercayaan pihak-pihak yang dirugikan dalam hubungan tersebut. Adanya hubungan yang saling tidak menguntungkan antara Pemerintah pengelola pasar dengan pemilik toko yang menyebabkan berkurangnya rasa saling percaya dan merusak kapital social yang terbangun sebelumnya.
6. Adanya norma-norma yang tegas dalam mengatur hubungan antara Pemerintah dengan pemegang IMK atau pemilik toko. Norma tersebut tertulis jelas dalam Perda tentang Pengelolaan Pasar, namun yang terjadi yaitu pihak yang seharusnya menjalankan norma tersebut kurang tegas sehingga norma yang ada dalam mengatur permasalahan yang ada tidak efektif dan terealisasi.



4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat dikemukakan:

1. Hubungan antara Pemerintah, Pengurus Pasar, serta pemegang IMK seharusnya memiliki tujuan yang sama yaitu memajukan pasar Sawahlunto tanpa ada keegoisan pribadi di dalam hubungan tersebut, sehingga masing-masing pihak sama-sama diuntungkan.
2. Pemerintah hendaknya mensosialisasikan ulang landasan aturan pembagian toko kepada pemegang IMK agar mereka memahami landasan dari pembagian yang telah ada.
3. Pemegang IMK seharusnya lebih memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hubungannya dengan Pemerintah.
4. Pemerintah hendaknya lebih tegas dalam menjalankan aturan-aturan yang ada dalam kasus banyaknya pemegang IMK yang hingga saat ini belum mengoperasikan tokonya.

